

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, tiga ratus lebih suku, budaya, agama, serta aliran kepercayaan menempatkan Indonesia sebagai negara besar di dunia dengan tingkat multikultural yang tinggi. Jika potensi yang sangat besar ini dapat dikelola secara baik akan memberikan kesejahteraan kepada bangsa ini, tetapi sebaliknya jika tidak baik dalam mengelolanya dan diperburuk lagi dengan efek negatif yang terdapat pada era modern seperti sekarang ini maka hal tersebut akan menghasilkan konflik sosial (Tan, 2006:36).

Konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik sosial tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, dan masalah kekuasaan, tetapi emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik (Noer dan Syam, 2008:424).

Konflik pada hakikatnya terbagi atas dua jenis, yakni konflik vertikal atau konflik antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (yang dikuasai), serta konflik horizontal atau konflik yang terjadi di antara kelas yang sama. Lebih lanjut, untuk membahas setiap situasi konflik, Coser membedakan konflik menjadi dua tipologi, yakni konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik (konflik yang digunakan untuk mendapatkan atau memenuhi

kepentingan tertentu), konflik non realistis yaitu konflik hanya sebagai media melepas ketegangan atau mencari kambing hitam (M. Poloma, 2007:106)

Pada umumnya di Indonesia didominasi oleh konflik horizontal seperti konflik etnis dan agama yang terjadi di beberapa daerah seperti di Maluku, Sambas, dan Poso. Namun juga terjadi konflik vertikal berupa gerakan separatisme pernah dan sebagiannya masih bergaung di beberapa provinsi seperti di Nangroe Aceh Darussalam dan Papua (Witarti dkk 2012:2).

Daerah Poso awalnya dikenal sebagai kota yang tenang di pinggir pantai Provinsi Sulawesi Tengah. Keadaan berubah menjadi kacau setelah Poso mengalami konflik yang hebat. Konflik ini bermula dari terjadinya penusukan kepada seorang remaja muslim yang dilakukan oleh seorang remaja kristen. Kejadian tersebut diakui oleh banyak pihak sebagai permasalahan yang ditimbulkan oleh minuman keras, akan tetapi permasalahan tersebut menjadi konflik yang serius yang menyebar diseluruh Kabupaten Poso (Klinken, 2007: 120). Konflik yang semula terjadi antar pemuda berubah menjadi konflik antar Agama dan berlangsung beberapa kali hingga menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa.

Puncak dari konflik sosial di Kabupaten Poso pada tanggal 16 April 2000 ketika Muin Pusadan terpilih menjadi Bupati Poso. Konflik terjadi karena pihak penganut Kristen tidak dapat menerima kemenangan tokoh ini. Pada tanggal 16 April 2000 konflik kembali pecah, aksi saling serang dan bakar terjadi lagi. Pada tanggal 27 April 2000, kelompok muslim melakukan penyerangan dan pembakaran di Kelurahan Lombogia. Serangan balasan dari pihak kelompok

Kristen terjadi pada 20 Mei 2000 ke Pesantren Wali Songo di desa Sintuwulemba. Sekitar 100 warga muslim tewas pada kejadian itu (Hendrajaya, 2010:23)

Menurut Pamuji dkk (2008:31) persoalan kesenjangan ekonomi adalah masalah yang tidak dapat dilepaskan dalam konflik Poso. Persoalan ekonomi ini ditandai dengan beralihnya kepemilikan tanah masyarakat pribumi ke masyarakat migran, transmigrasi merupakan akar masalah konflik sosial di Kabupaten Poso (Muin, 2008: 3).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa adanya konflik di Poso dipengaruhi faktor ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya peralihan kepemilikan tanah masyarakat pribumi ke masyarakat pendatang. Akar masalah konflik sosial ini sesuai dengan teori penyebab konflik yang disampaikan oleh Fisher yang menyatakan bahwa konflik sosial dapat disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi Fisher dkk (2001:8).

Berkat komitmen pemerintah akhirnya konflik Poso dapat diselesaikan sehingga Poso sekarang sudah aman dan tentram di Poso pasca perjanjian Malino. Upaya Polri untuk membangun suasana aman dan tentram di Poso pasca perjanjian Malino merupakan bagian dari implementasi Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, sehingga upaya mewujudkan keamanan dalam negeri merupakan bagian dari komitmen Polri sebagai penyelenggara fungsi Keamanan Dalam Negeri pasca pemisahan Polri dari TNI (Muradi, 2012:81)

Guna mencegah konflik sosial di Poso tidak terjadi kembali lagi, maka diperlukan strategi yang tepat dalam mencegahnya. Berkaitan dengan hal tersebut,

kontribusi berbagai pihak juga dibutuhkan, terutama kontribusi dari pihak pemerintah daerah sebagai pemegang tanggung jawab di daerah. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai strategi yang diterapkan pemerintah daerah terhadap permasalahan penanganan konflik sosial di Poso dengan judul penelitian “Strategi Pemerintah Daerah Poso Periode 2010-2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial di Poso?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial di Poso?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Peneliti mengacu pada perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial di Poso.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial di Poso.

Peneliti mengacu pada perumusan masalah di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan analisis politik dan pemerintahan yang fokus pada strategi Negara Indonesia dalam mencegah terjadinya konflik sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi sebuah masukan dan juga rekomendasi bagi pemerintah agar melakukan pencegahan terhadap terjadinya konflik sosial.